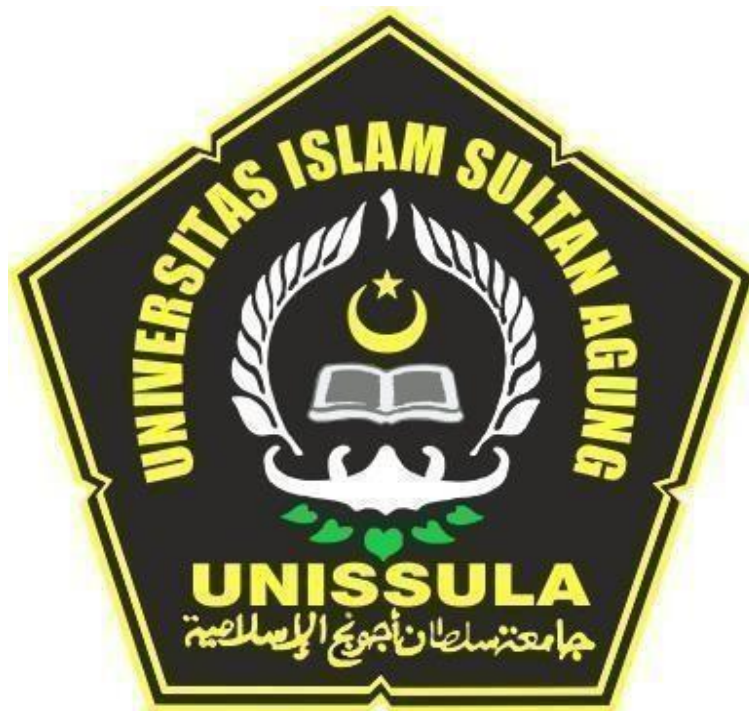


LAPORAN MAGANG
PERAN JUKIR DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHANRETRIBUSI PARKIR DI KOTA
SEMARANG
(STUDI PADA DINAS PEHUBUGAN DIVISI
PARKIR KOTA SEMARANG)



Disusun oleh:

PRANDANI BUDI AMANULLAH

(31401800138)

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG FAKULTAS EKONOMI PRODI
AKUTANSI

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN JUKIR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
RETRIBUSI
PARKIR DI KOTA SEMARANG (STUDI PADA DINAS
PERHUBUNGAN DIVISI
PARKIR KOTA SEMARANG)

Disusun Oleh:

PRANDANI BUDY AMANULAH

NIM : 31401800138

Susunan Dewan Penguji

Dosen pembimbing
lapangan



Dr. SriAnik, SE, M.Si

NIDN0604086802

Dosen Penguji I



DeviPermatasari, S.E., M.Si., Ak.CA

NIK.211413024

Dosen Penguji II



Khoirul fuad, SE, M.Si, Ak.CA

NIK. 211413023

Mengetahui,
Kaprosdi S1 Akutansi



Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si

NIK.211415029

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nyasehingga kami dapat menyelesaikan Laporan magang yang berjudul Peran jukir dalam jukirdalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak parkir dikota semarang (Studi parkir pada dinas perhubungankotasemarang). Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan magang yang penulis lakukan selama satu bulan lebih di divisi parkir. Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum Guselaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan izin dan semangat serta selalu mendoakan penulis.
3. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si selaku ketua prodi akutansi yang membantu dalam sisempermagangan
5. Ibu Dr. Sri Anik, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah membimbing dari awal hingga akhir serta memberikan ilmu kepada penulis.
6. Bapak Joko selaku Kepala Bidang parkir dinas perhubungankota semarang.
7. Bapak Rusmanto, SE selaku kepala bagian perizinan parkir dinas perhubungan kota semarang..

8. Seluruh karyawan/karyawati Divisi parkir dinas perhubungan kota Semarang.
9. Teman-teman Akuntansi yang senantiasa memberikan saran dalam penyusunan Laporan magang ini.
10. Kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan izin dan semangat serta selalu mendoakan penulis.

Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga laporan magang ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Semarang, 21 Juni 2021

penulis



UNISSULA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Prandani Budi Amanula

Nim: 31401800138

DAFTAR

ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	7
LATAR BELAKANG.....	7
TUJUAN MAGANG.....	13
SISTEMATIKA LAPORAN	13
BAB 2 PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	15
2.1 Profil perusahaan.....	15
2.2 VISI, MISI & profil perusahaan	15
2.3 Tugas bidang parkir.....	17
2.4 Tugas kepala bidang parkir.....	18
2.5 Seksi pemungutan	20
2.6 Tugas kepala perizinan.....	21
2.7 Aktivasi magang	22
BAB 3 IDENTIFIKASI MASALAH.....	24
RUMUSAN MASALAH.....	24
BAB 4 KAJIAN PUSTAKA.....	26
4.1 UUD tentang parkir.....	26

4.2	Retribusi parkir	26
4.2.1	Objek subjek pajak parkir.....	27
4.3	Juru parkir.....	28
4.3.1	Tugas juru parkir.....	28
4.3.2	Perlengkapan utama juru parkir.....	29
4.4	Retribusi parkir umum	29
4.5	Sistem pengendalian manajemen	30
4.6	Teori penyesuaian diri	30
4.7	Pragmatic accounting.....	31
BAB 5 ANALISIS DAN KESIMPULAN		32
ANALISIS.....		32
5.1	Analisi Prolog.....	32
5.2	Pembahasan.....	37
BAB 6.....		42
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		42
6.1	Kesimpulan.....	42
6.2	Rekomendasi.....	43
BAB 7 REFLEKSI DIRI.....		45
REFLEKSI DIRI.....		48
DAFTAR PUSTAKA.....		49
Lampiran – Lampiran		50



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kota Semarang untuk menghasilkan penerimaan daerah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan keberibadian daerah yaitu dapat diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Kota Semarang. Peraturan daerah (Perda) Kota Semarang No 3 Tahun 2012 membahas mengenai retribusi yaitu retribusi tempat khusus parkir.

UUD Republik Indonesia No 28 tahun 2009 yang membahas tarif retribusi parkir paling tinggi 30% tarif tersebut di tetapkan oleh peraturan daerah. Bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk dapat mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Kota Semarang dapat menggali potensi daerahnya dengan memaksimalkan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan Retribusi Jasa Usaha yaitu melalui retribusi parkir.

Masih banyak parkir di kota semarang yang tidak sesuai atau biasa disebut liar. Banyak yang masih menggunakan bahu jalan untuk dijadikan parkir tentunya hal tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas, Rambu lalu lintas seperti dilarang

parkir juga tidak di perhatikan dalam melakukan parkir. Contoh ketidak disiplin dalam parkir berada di salah satu pasar yaitu pasar johar lama yang dimana para jukir ataupun pengendara selalu menggunakan bahu jalan untuk parkir yang seharusnya sudah jelas rambu dilarang parkir di area tersebut. Padahal pemerintah sudah menyediakan lahan parkir di dekat pasar johar tetapi masih ada juga yang parkir di bahu jalan meskipun sudah di tertibkan bekal kali . Hal tersebut merupakan salah satu contoh ketidak disiplin parkir di kota semarang yang sering menyebabkan kemacetan.

Di saat panedemi Pendapatan parkir jukir menurun drastis bahkan ada yang tutup parkir di karenakan pembatasan yang di lakukan pemerintah . Hal tersebut mengakibatkan jukir susah dalam pembayaran pajak dikarenakan penghasilan yang menurun drastis di mulai pada awal tahun 2020 sekitar bulan february awal pademin berlangsung pada table di bawah ini

Tabel 1.1

Target pendapaatan retribusi

Tahun	Target	Realisasi	Prosentasetarget dan;Realisasi Parkir	Selisih Target DanRealisasi Parkir
2018	Rp16,053,394,000,-	Rp3,643,807,000,-	22.70%	Rp12,409,587,000,-

2019	Rp30,364,428,000,-	Rp3,941,585,000,-	12,98%	Rp26,522,843,000,-
2020	Rp3,221,381,800,-	Rp1,8552,827,000,-	55,45%	Rp1,368,554,800,-

Sumber: Data dinas perhubungan kota semarang

Keterlambatan dalam pembayaran retribusi yang menyebabkan semakin menumpuknya tagihan dan akan semakin susah pula untuk membayarannya di karenakan pendapatan yang menurun disebabkan oleh pandemi. Dampak tersebut akan dirasakan sendiri oleh jukir saat dishub bertindak tegas untuk mecabut perizinan parkir atau memberi surat peringatan di lokasi tersebut jika jukir telat membayar selama berbula bulan.Tindakan tegas tersebut terpaksa dilakukan agar kebutuhan retribusi terpenuhi.

Banyak atau sedikitnya Retribudis parkir yang harus dibayar oleh jukir dipengaruhi dari luas permeter tempat jukir beroperasi terutama jukir yang ada pada parkir umum di sejumlah warung makan atau restoran, hal itu merupakan kebijakan dari dinas perhubungan. Selain masalah tersebut banyak pula permasalahan mengenai Perizinan parkir di kota semarang di kategorigakan menjadi tiga bagian yaitu Umum, Khusus,danSwasta yang dimana masingm asing mempunyai perbedaan tata kelola parkir tersebut.Selain perizinan parkir dishub kota semarang divisi parkir juga memberi ketentuan tentang Retribusi yang harus di bayarkan kepada setiap jukir yang terdaftar dan mempunyai izin sedangkan yang belum

mempunyai izin akan di realisasikan terlebih dahulu tergantung kesepakatan yang di buat pada saat pengajuan perizinan lokasi parkir oleh jukir tersebut. Peran jukir terhadap kepatuhan Retribusi parkir yang dikelola oleh Dishub penting akan adanya karena hal tersebut untuk menghindari parkir liar tanpa izin dan tanpa pembayaran retribusi yang meresahkan masyarakat, hal tersebut tentunya akan beresiko. Pembayaran atau setoran biasanya dilakukan perhari atau perbulan terhadap jukir yang mengelola titik lokasi jika terjadi permasalahan seperti perebutan titik lokasi parkir di masing masing wilayah di karenakan tidak ada perizinan parkir dan pembayaran retribusi di kedua belah pihak yang dapat memicu tindak kriminal..

Adapun beberapa ketentuan dalam pengajuan lokasi parkir yaitu seperti :

- Tidak mengganggu rambu lalu lintas seperti jika terdapat rambu dilarang parkir maka tidak boleh pula membuat lokasi tersebut menjadi lokasi parkir oleh jukir.
- Tidak banyak menggunakan bahu jalan apabila menggunakan bahu jalan yang dapat menyebabkan kemacetan maka akan di tolak pula pengajuan perizinan tersebut.
- Harus mempunyai lahan sendiri untuk parkir dan mendapatkan izin dari pemilik
- Tarif parkir yang di tarik jukir sesuai dengan tarif yang sudah di tentukan oleh pemerintah misal tarif kendaraan roda 4 atau lebih : Rp. 3000 dan tarif kendaraan roda 2 : Rp. 2000

Ketentuan Ketentuan diatas dalam pengajuan perizinan lokasi parkir tentunya melewati tahap survey terlebih oleh dinas perhubungan kota semarang sebelum ACC dan ketahap selanjutnya yaitu kesepakatan dengan menggunakan materai yang menandakan bahwa jukir setuju dengan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh dishub agar jukir menaati segala aturan yang telah dibuat termasuk juga bertujuan untuk terciptanya kedisiplinan oleh jukir agar jukir tidak seenaknya sendiri dalam bertindak dan melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lembar persetujuan. Setelah melakukan menandatangani surat persetujuan yang berarti calon jukir sudah bersedia dengan ketentuan ketentuan yang ada, maka jukir akan di proses untuk pembuatan KTA atau Kartu Tanda Anggota jukir terbut. Barang siapa yang belum memiliki KTA tersebut maka bisa dipastikan jika parkir yang di kelola oleh jukir tersebut ilegal atau biasa disebut dengan liar.

Dalam laporan kali ini akan berfokus kepada pembahasan retribusi yang berkaitan denganbeberapa masalah yang telah disebutkan diatas yang kedepannya akan di bahas secara lebih ter perinci serta solusi yang akan di berikan agar masalah retribusi tersebut terselesaikan tanpamerugikan siapapun. Tujuan pembahasan peran jukir dalam meningkatkan tingkat kepatuhan retribusi parkir dikota semarang (Studi pada dinas perhub divisi parkir kota semarang) tersebut bertujuan untuk menganalisa kepatuhan jukir terhadap retribusi yang berlaku seperti yang telah di sepakati pada saat melakukan pengajuan perizinan lokasi parkir . tidak hanya itu

tujuan dari menganalisa tingkat kepatuhan jukir terhadap retribusi juga bertujuan untuk melatih kedisiplinan pembayaran retribusi seperti yang lainnya agar terhindar dari resiko yang berdampak pada masyarakat seperti pemungutan pada parkir liar yang melebihi tarif standar.

Selain untuk menganalisa jukir tersebut, pembahasan retribusi parkir juga bertujuan untuk menganalisa masyarakat sejauh mana masyarakat tersebut mengetahui retribusi parkir yang sudah ditetapkan dinas perhubungan kota semarang seperti perizinan lokasi parkir, persyaratan apa yang harus wajib dipatuhi dalam pengajuan perizinan parkir dan ketentuan apa saja yang menjadi syarat pengajuan lokasi parkir. Berikut flowchart prosedur pembayaran retribusi (flowchart di taruh bab (2))

1.2 Tujuan magang

Berdasarkan latar belakang tersebut, apa yang maksud dari pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan yaitu :

1. Untuk menganalisis juru parkir dalam kepatuhan membayar retribusi.
2. Untuk mengetahui sistematika dalam pembayaran retribusi.
3. Untuk mengetahui cara juru parkir dalam meningkatkan kepatuhan membayar retribusi .

4. Mendapatkan informasi yang di butuhkan agar bisa menganalisis juru parkir dalam menaati peraturan yang ada pada rtribusi parkir di semarang.
5. Menganalisis data dari pendapatan retribusi parkir agar bisa mengetahui tingkat kepatuhanjuru parkir dalam pembayara retribusi.
6. Mengenalisis juru parkir dalam seberapa banyak informasi yang di ketahui dalam halpembayaran dan syarat parkir.
7. Mengamati jukir melalui di lapangan untuk mengetahui seberapa profesionalnya dalam bekerja melalui laporan yang di dapat dri masyarakat.
8. Ikut serta dalam survey lapangan jika ada juru parkir mengajukan titik lokasi baru
9. Membantu dalam pendataan setoran jukir perbulannya agar bisa mengetahui sebrapatinggi kepatuhan juru parkir dalam pembayaran retribusi.
10. Melaksanakan perintah Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan bidang pendidikan pendidikan yang di tempuh yaitu bidang akuntansi.

1.3 Sistematika laporan

Laporan magang dibuat menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan berdasarkan pengalaman magang seperti topik permasalahan atau resiko yang ditimbulkan pada saat magang.

BAB II : PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Menjelaskan tentang profil instansi yang di sebutkan secara spesifik dan menguraikan seluruh kegiatan atau aktifitas selama magang.

BAB III: IDENTIFIKASI MASALAH

Menjelaskan mengenai permasalahan yang dialami pada saat pemilihan laporan magang atau mengidentifikasi permasalahan pada saat magang.

BAB IV : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai teori yang digunakan pada pembahasan penelitian laporan magang.

BAB V: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Memaparkan dan menganalisis data yang didapat selama kegiatan magang.

BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

memberikan penjabaran mengenai kesimpulan pembahasan pada isi laporan dan rekomendasi kepada tempat magang

BAB VII: REFLEKSI DIRI

Memberikan penjabaran tentang hal positif dan manfaat pada saat mengikuti kegiatan seperti manfaat pengalaman yang didapatkan selama kerja pra

BAB II

Profil perusahaan & aktivitas magang

2.1 Profil Perusahaan tempat magang

PROFILPERUSAHAAN



ALAMAT : Jl. Tambak aji raya no.5 ngaliyan kota semarang
KONTAK 1500094
MEDSOS : @dishubkotasmg / dishub.semarangkota.go.id

2.2 VISI, MISI & Struktur Organisasi

2.3 Visi

“TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN
TERTIB DIKOTA PERDAGANGAN DAN JASA”

Visi tersebut di atas mengandung arti sebagai berikut :

- Transportasi, dalam arti suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan Sumber Daya Manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.
- Pelayanan transportasi yang handal, di indikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepatwaktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah kota serta mampu mendukung pembangunan kota.
- Kota Perdagangan, mengandung arti kota yang mendasarkan bentuk aktifitas pengembangan ekonomi yang menitik beratkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota yang di dalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan.
- Kota jasa, sebutan kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa.

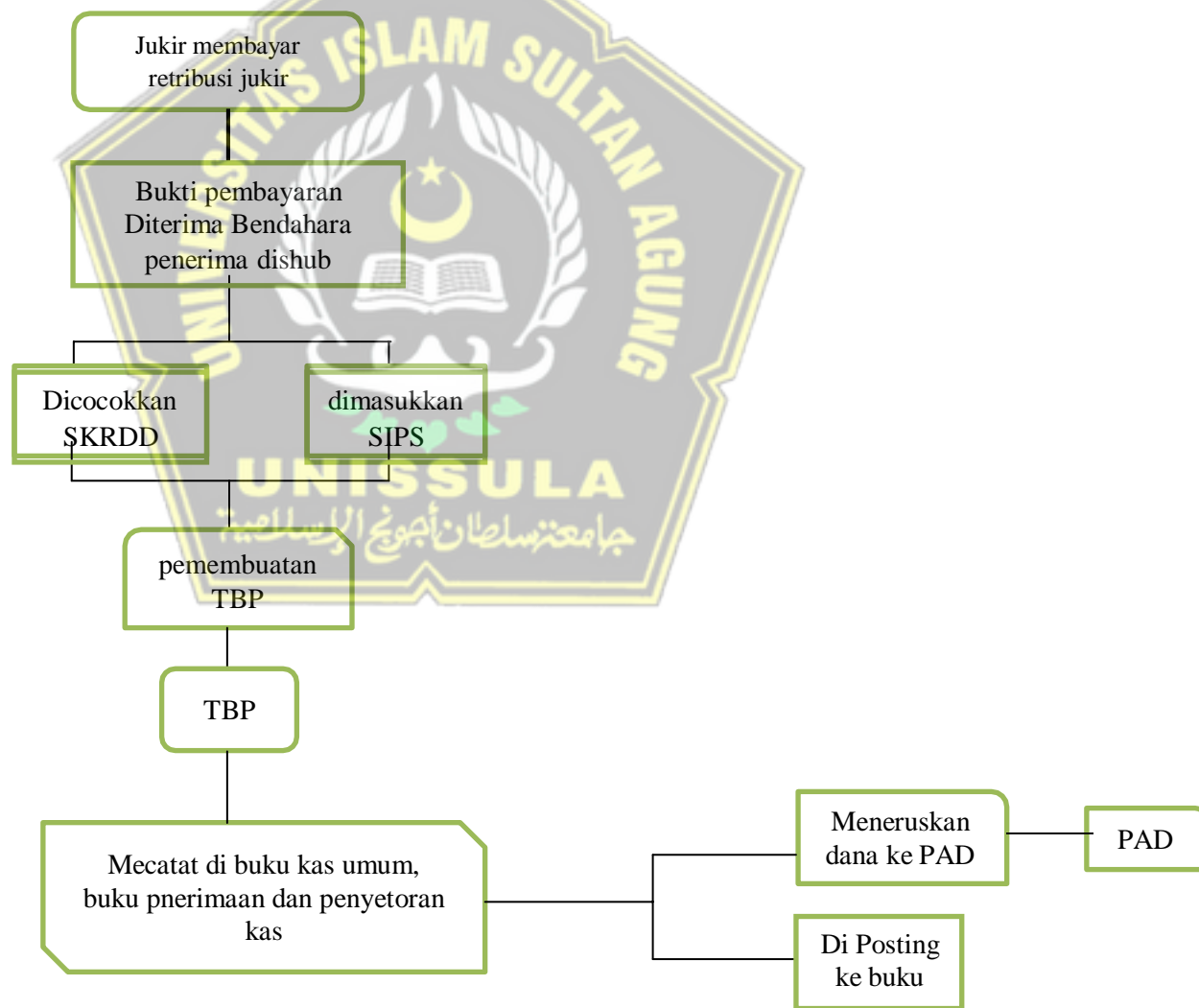
Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan tersebut, maka di jabarkan dalam misi sebagaiberikut :

- Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan tehnis di bidang perhubungan.

- Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal.
- Mewujudkan pelayanan transportasi missal perkotaan dan per parkir an yang nyaman dan tertib.
- Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi.

**Gambar Prosedur pembayaran retribusiKas
Dinas Perhubungan Devisi parkir**



Gambar Flowchart prosedur pembayaran retribusi

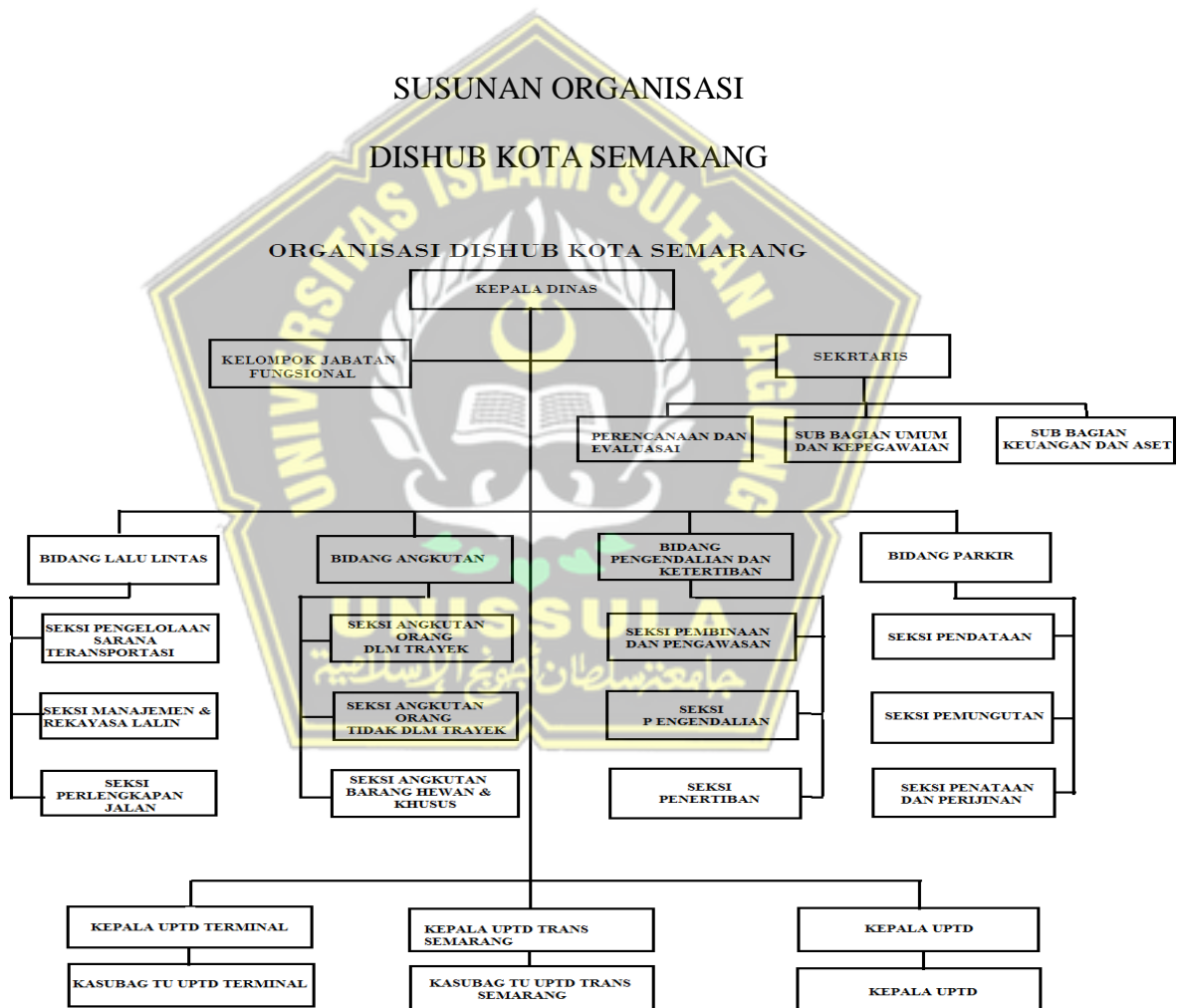
Penjelasan

SKRD : surat ketetapan retribusi daerah

TBP : tanda bukti penerimaan

SIPS : Web khusus Dinas Perhubungan Devisi Parkir

PAD : Pendapatan Asli Daerah



Sumber: Data dinas perhubungan kota semarang

2.4 Tugas bidang parkir

Bidang Parkir, terdiri atas Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, Seksi Penataan dan Perizinan. Bidang Perparkiran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Penataan dan Pengembangan, Bidang Parkir Umum dan Khusus serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perparkiran mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
2. Pendistribusian tugas ke pada bawahan
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakandi Bidang Parkir
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan dan Perizinan;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Parkir
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di

Bidang Parkir

11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.5 Tugas Kepala bidang parkir

Program Penataan Parkir di Kota Semarang Berdasarkan Undang Undang Lalu Lintas Aturan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Kota Semarang memberlakukan larangan parkir di beberapa titik untuk mengurangi kemacetan serta menertibkan lalu lintas di Kota Semarang, diantaranya Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, Kawasan Simpang Lima, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Gajah mada. Walaupun telah diberikan rambu larangan lalulintas dan Patroli keliling yang sering diadakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Satuan Lalu Lintas Kota Semarang, masih ditemukan pelanggar yang memarkirkan kendaraannya pada kawasan larangan parkir.

Berikut masing masing tugas dari Kepala bidang parkir, seksi pemungutan dan Kepala Seksi Penataan dan Perizinan :

Kepala Bidang Parkir mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta meng evaluasi Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan dan Perizinan.

Kepala Seksi Pendataan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pendataan
2. membagi tugas kepada bawahan, membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
3. memeriksa hasil kerja bawahan
4. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
5. menyiapkan pelaksanaan koordinasi
6. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pendataan
7. menyiapkan kegiatan pendataan juru parkir
8. lahan dan potensi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus
9. menyiapkan kegiatan penentuan dan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum meliputi parkir umum dan parkir khusus
10. menyiapkan kegiatan pengembangan terhadap pelaksanaan system

pengelolaan perparkir yang meliputi sistem dan prosedur Perizinan penyelenggaraan

11. pemungutan retribusi dan penataan ketertiban parkir
12. menyiapkan kegiatan kajian pendataan dan pengelolaan perparkiran, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pendataan;
13. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Seksi Pendataan
14. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
15. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan
16. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.6 Seksi Pemungutan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemungutan
2. membagi tugas kepada bawahan; membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
3. memeriksa hasil kerja bawahan

4. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
5. menyiapkan pelaksanaan koordinasi menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemungutan
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir
7. menyiapkan bahan pelaksanaan penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemungutan
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Seksi Pemungutan
10. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
11. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan
12. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.7 Kepala Seksi Penataan dan Perizinan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penataan dan Perizinan

2. membagi tugas kepada bawahan
3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
4. memeriksa hasil kerja bawahan
5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi
7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penataan dan Perizinan
8. menyiapkan kegiatan kajian teknis Perizinan pengelolaan
9. menyiapkan kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
10. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengaturan tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah daerah
11. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengaturan tempat khusus parkir pada lokasi dan gedung parkir milik pemerintah daerah
12. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penataan dan Perizinan; menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Seksi Penataan dan Perizinan
13. menyiapkan Penilaian kinerja bawahan; menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan
14. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

Penataan dan Perizinan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2.8 Aktivitas Magang

Kegiatan yang dilakukan selama magang sebagai berikut:

1. Memindahkan data titik lokasi parkir yang berada pada situs web khusus untuk dishub divisi parkir ke dalam excel.
2. Memindahkan kertas bukti pembayaran atau nota parkir ke dalam lembar kerja
3. Membantu dalam pengecapan karcis parkir agar lebih memudahkan dalam bertransaksi
4. Mencocokkan angka di rekon dengan rincian bukti pembayaran retribusi parkir melalui kertas kerja
5. Memasukkan data titik lokasi parkir yang belum lengkap pada excel
6. Membantu melakukan pemberkasan dokumen pegawai
7. Membantu melakukan pembukuan bulan April, Mei, dan Juni yang diambil dari kertas kerja
8. Memasukkan data titik lokasi yang baru
9. Membantu melayani jukir yang datang untuk perpajakan izin atau menyalurkan pengaduan jukir mengenai permasalahan di lingkungan
10. Membantu mengoreksi buku besar jika ada kekurangan atau kesalahan dan

menjumlah total setoran pertanggal (Pada bulan maret, april, mei, dan juni)

11. Sosialisasi jukir terhadap keuntungan bpjs ketenaga kerjaan pada saat pekerja dilakukan



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 RUMUSAN MASALAH

Dalam pelaksanaan kegiatan magang yang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan mahasiswa tentunya mengalami berbagai kendala yang dihadapi dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman kerja lapangan, Masalah masalah tersebut bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa agar lebih mengetahui lebih dalam mengenai kerja lapangan. Berikut beberapa masalah masalah yang saya temui pada saat proses magang dilakukan :

1. Retribusi parkir merupakan hal yang wajib di bayarkan pada setiap jukir yang bertugas, dalam situasi pandemi seperti ini lokasi parkir yang berada di beberapa tempat tergolong sepi di akibatkan oleh penutupan penutupan jalur di karenakan pandemi dan hal tersebut mempengaruhi pendapatan jukir untuk membayar retribusi.
2. Minimnya informasi mengenai retribusi parkir yang ada di kota semarang mengakibatkan beberapa jukir yang terjaring razia karena tidak adanya izin mendirikan lokasi parkir, mau jukir baru atau lama. Minimnya informasi juga mempengaruhi pada perpanjangan ijin parkir yang berada pada titik lokasi parkir contohnya ketidaktahuan jukir mengenai syarat syarat mengajukan

perizinan parkir atau memperpanjang perizinan parkir

Dari beberapa masalah tersebut diatas, maka dalam pelaporan magang ini memilih topik “ Peran Juru Parkir (Jukir) dalam Meningkatkan Tingkat Kepatuhan retribusi parkir studi pada dinas perhubungan kota semarang alasan mengambil topik adalah untuk mengetahui sejauh mana juru parkir berperan penting dalam pembayaran retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh dishub Semarang . Karena masih banyaknya juru parkir yang kurang berperan aktif dalam pemabayaran retribusi parkir yang menyebabkan target pendapatan tidak tercapai.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Undang undang tentang parkir

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Kota Semarang. Dalam Daerah (Perda) antara lain tentang retribusi yaitu retribusi tempat khusus parkir. Sejalan dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah yang memberi kewenangan pada kabupaten/kota untuk mengatur wilayahnya tersebut dengan mandiri sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya guna Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemkot Semarang bisa menggali potensi daerahnya itu sehingga PAD nya dapat dimaksimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan melalui retribusi parkir.

4.2 Retribusi parkir

Menurut Yoyo (2017: 108) retribusi daerah ialah sebuah sumber PAD yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemda guna meningkatkan layanan pada masyarakat dan kemandirian daerah, maka retribusi jasa usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas 9 jenis ialah retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, retribusi Tempat Pelelangan, retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, retribusi Tempat Khusus Parkir, retribusi Terminal dan retribusi Tempat

Penginapan / Villa / Pesanggrahan, retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, retribusi Rumah Potong Hewan, dan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

4.2.1 Objek, Subjek dan Wajib parkir

Pada pasal 110 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum. Dilihat dari penjabaran Pasal 114, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ialah penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Tiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan yang disediakan berhubungan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai sebuah usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan, dipungut pajak dengan nama Retribusi Parkir. Objek retribusi Parkir ialah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik itu yang disediakan berhubungan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai sebuah usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang tidak termasuk dalam objek retribusi parkir pada ayat (1) ialah:

1. menyelenggarakan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemda;
2. Pengelolaan tempat parkir otoritas, yang bisa dipakai oleh pegawainya; dan 3. Pengelolaan parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik.
4. Subjek counter tax ialah individual ataupun badan hukum yang memarkir kendaraan bermotor .

Sedangkan penyedia parkir ialah seseorang/badan hukum yang menyelenggarakan tempat parkir.

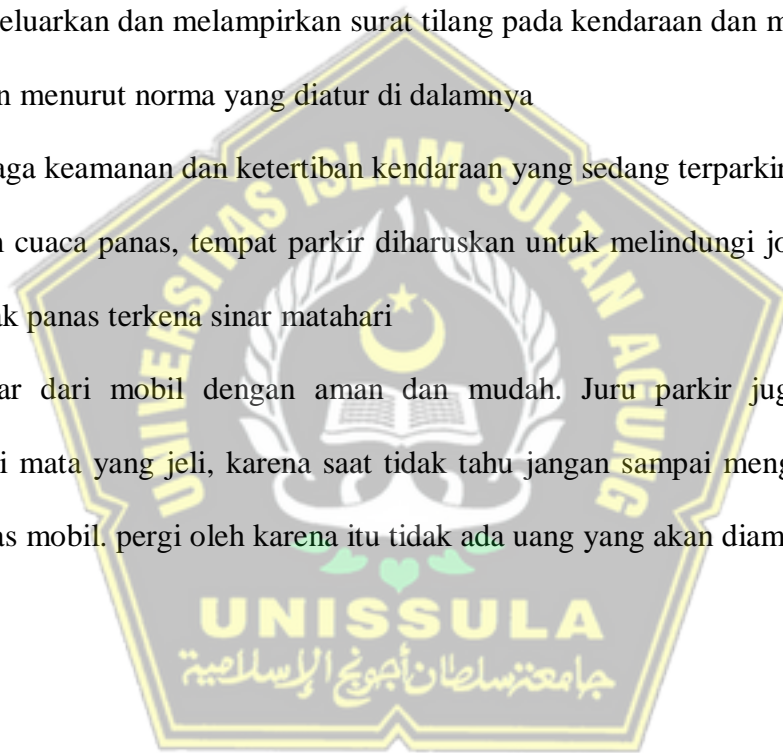
4.3 Juru parkir

Petugas parkir yang dikenal dengan Jukir ialah seseorang yang mengatur kendaraan

yang keluar masuk di area parkir. Petugas juga meninggalkan tempat parkir dengan tugas memungut biaya parkir dan mengeluarkan karcis parkir. Harga parkir di tempat seperti itu biasanya harga tetap dan tidak ada pembatasan waktu, dikarenakan tiket tidak dilengkapi dengan jam keberangkatan dan kedatangan mobil

4.3.1 Tugas juru parkir

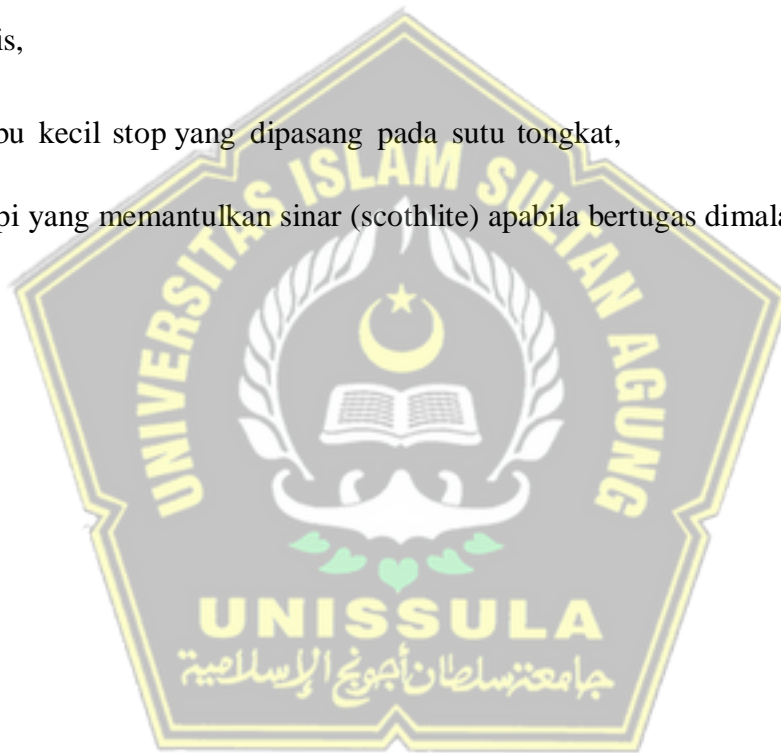
1. Pelayanan terhadap semua kendaraan yang keluar masuk area parkir
2. Mengeluarkan dan melampirkan surat tilang pada kendaraan dan menerima hukuman menurut norma yang diatur di dalamnya
3. Menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang sedang terparkir
4. Dalam cuaca panas, tempat parkir diharuskan untuk melindungi jok motor agar tidak panas terkena sinar matahari
5. Keluar dari mobil dengan aman dan mudah. Juru parkir juga harus memiliki mata yang jeli, karena saat tidak tahu jangan sampai mengabaikan lalu lintas mobil. pergi oleh karena itu tidak ada uang yang akan diambil.



4.3.2 Perlengkapan utama juru parkir

Juru parkir harus memiliki perlengkapan parkir berikut ini:

- Peluit,
- Seragam parkir,
- Karcis,
- Rambu kecil stop yang dipasang pada satu tongkat,
- Rompi yang memantulkan sinar (scotchlite) apabila bertugas di malam hari.



4.4 Retribusi parkir umum

Pada pasal 38 Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang merupakan revisi dari Perda No 1 Tahun 2004 tentang Parkir Umum yang menyebutkan bahwa tarif parkir sepeda motor dari Rp500 menjadi Rp1.000, kendaraan roda tiga dari Rp750 menjadi Rp1.500; kendaraan roda empat dari Rp1.000 menjadi Rp2.000; kendaraan roda enam dari Rp2.000 menjadi Rp4.000; dan kendaraan beroda lebih dari enam dari Rp3.500 menjadi Rp7.000. Dilihat dari regulasi terbaru di pasal 2 Peraturan Walikota Semarang No 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang menggantikan pasal 38 Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2012 tentang besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dimana ini menjelaskan tentang besaran tarif untuk sekali parkir kendaraan beroda dua yaitu Rp. 2.000, kendaraan beroda tiga Rp. 2.000, kendaraan beroda empat Rp.3.000, kendaraan beroda enam dan lebih dari enam yaitu Rp.15.000.

Jadi, dapat diartikan bahwa retribusi ialah sebuah pendapatan yang didapat dari usaha pemda untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan kewajiban memberikan pengganti berwujud uang sebagai pendapatan kas daerah (Fauzan, 2006)

4.5 Teori penyesuaian diri

Penyesuaian diri diartikan sebagai interaksi yang berkelanjutan dengan diri sendiri, yaitu apa yang sudah ada dalam diri individu mengenai perilaku, tubuh, pemikiran, dan perasaan terhadap orang lain (Calhoun, 1990). Salah satu Hakikat Manusia dalam Perspektif ialah proses penyesuaian. Penyesuaian diartikan sebagai sebuah proses yang tidak dapat dipisahkan oleh berbagai macam makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk hewan dan tumbuhan. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan dirinya sendiri ataupun penyesuaian terhadap lingkungan sekitar. Penyesuaian diri bisa disebut sebagai *adjustment* yang mempunyai banyak makna dalam tergantung dari sudut pandangnya. Tidak terdapat yang namanya penyesuaian diri baik ataupun buruk, namun penyesuaian diri ialah sebuah bentuk interaksi individu terhadap tuntutan di lingkungan sekitar.

4.6 Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Anthony dan Reece (1984:824) mengartikan bahwasannya sistem pengendalian manajemen ialah sistem yang mempunyai fungsi dalam pengendalian tiap kegiatan yang terjadi didalam sebuah perusahaan guna menentukan strategi

yang sesuai dan dapat mencapai tujuan organisasi. Pengendalian biaya efektif ini tergantung pada komunikasi antara pihak manajemen dan pihak informasi akuntan. Dengan menciptakan laporan prestasi kerja, maka pihak pengendali akan memberi saran pada pihak manajemen terkait dengan sebuah tindakan perbaikan yang diperlukan oleh kegiatan tertentu. Laporan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pernyataan langsung/tertulis dari pihak pengendali ke pihak manajemen sebuah perusahaan. Isi laporan ini yaitu mengenai laporan prestasi kinerja suatu karyawan.

4.7 Pragmatic Accounting

Menurut Hendriksen (1982) Periode ini disebut dengan masa ilmiah umum. Selama periode ini perkembangan teori yang paling prihatin dengan memberi sebuah penjelasan praktek. Penekanannya ialah pada penyediaan sebuah kerangka menyeluruh untuk mengembangkan praktek akuntansi. Teori ini dikembangkan berdasar analisa empirik, metode yang sering digunakan di ilmu fisika. Analisis empiris ini tergantung pada observasi dunia nyata dibanding mengandalkan logika. Hal ini melibatkan pengembangan teori atas dasar apa yang telah diamati. Contohnya, selama periode ilmiah umum teori akuntansi, teori terkait dengan bagaimana akun tersebut dikembangkan memakai pendekatan analisa empiris.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

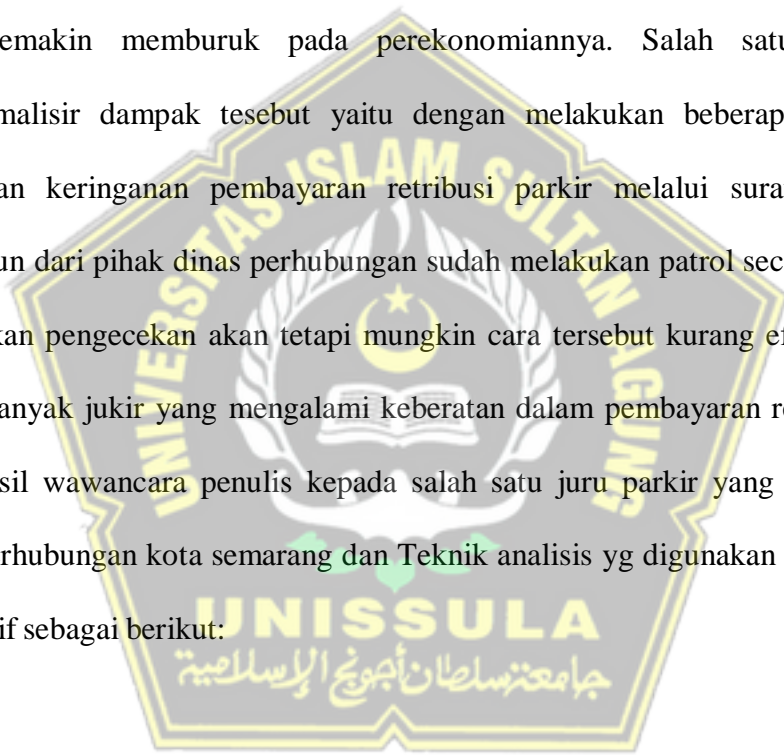
5.1 ANALISIS PROLOG

Retribusi parkir merupakan hal yang wajib dibayarkan pada setiap jukir yang bertugas di lapangan sesuai dengan jam kerja setiap tempat, dalam situasi pandemi seperti ini lokasi parkir yang berada di beberapa tempat tergolong sepi diakibatkan oleh penutupan penutupan jalur di karenakan pandemi dan hal tersebut menjadi permasalahan yang dialami oleh juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya yang terkendala oleh beberapa faktor menjadi penyebab jukir kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi parkir sesuai yang sudah di tentukan.

Permasalahan yang terjadi kepada jukir dalam pembayaran retribusi yang diakibatkan oleh penutupan beberapa akses jalan membuat jukir mengalami penurunan pendapatan parkir sehingga menyebabkan jukir kesulitan dalam pembayaran retribusi parkir, Karena permasalahan tersebut pula terkadang juru parkir melakukan tindakan seperti penambahan jam operasional parkir lebih dari yang ditetapkan oleh dinas perhubungan kota semarang. hal ini di alami bukan hanya satu jukir tetapi beberapa jukir yang berada dalam wilayah zona merah pandemi covid-19. Untuk memenuhi tanggung jawab pembayaran retribusi, jukir

merelakan menambahkan penghasilan bersih untuk membayar retribusi. Kejadian tersebut sering di keluhkan jukir pada saat berada pada kantor dishub kota semarang karna memang jika terjadi terus menerus akan menyebabkan kelumpuhan ekonomi

pada juru parkir di beberapa daerah. Dalam menanggapi permasalahan tersebut perlu dilakukannya koordinasi antara pihak dishub dengan juru parkir agar tidak semakin memburuk pada perekonomiannya. Salah satu cara untuk meminimalisir dampak tersebut yaitu dengan melakukan beberapa cara seperti pengajuan keringanan pembayaran retribusi parkir melalui surat atau online. Walaupun dari pihak dinas perhubungan sudah melakukan patrol secara rutin untuk melakukan pengecekan akan tetapi mungkin cara tersebut kurang efektif sehingga masih banyak jukir yang mengalami keberatan dalam pembayaran retribusi seperti pada hasil wawancara penulis kepada salah satu juru parkir yang tercatat dalam dinas perhubungan kota semarang dan Teknik analisis yg digunakan adalah analisis deskriptif sebagai berikut:



Tabel 5.1.1

Hasil wawancara juru parkir I

NO	Pertanyaan	Jawaban Juru parkir
----	------------	---------------------

1	Sejauh mana dampak yang di timbulkan pada saat ppkm level 4 diterapkan ?	Sangat berdampak pada penghasilan yang menurun dikarenakan pandemi tersebut terutama pada saat ppkm level 4 pada saat diberlakukannya penutupan beberapa jalan di kota semarang yang membuat toko menjadi berkurang jam buka bahkan sampai tutup beberapa hari menyebabkan tidak adanya pemasukan.
2	Berapa persen penurunan hasil pendapatan jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemic?	Sekitar 60% sampai 80% tergantung dengan situasi yang terjadi di lapangan dikarenakan jam kerja yang di batasi juga hanya sampai toko tutup, terlebih toko tutup lebih awal dikarenakan pembatasan yang diberlakukan.
3	Apakah ada kendala dalam pembayaran retribusi?	Untuk pembayaran retribusi pastinya ada kendala karena ppkm otomatis pendapatan menurun dan menjadi agak susah untuk pembayaran retribusi
4	Bagaimana cara mengantisipasi	Tidak ada antisipasi yang bisa di

	pembayaran retribusi pada saat ppkm berlangsung	lakukan, hanya bisa menggunakan dana milik sendiri untuk membayar retribusi yang wajib di bayarkan
--	---	--

Sumber : Hasil Wawancara (tahun 2021)

Berdasarkan pada tabel 5.1 mengenai pembahasan sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwasannya jukir atau juru parkir terdapat keberatan mengenai pembayaran retribusi pada saat ppkm atau pandemi berlangsung. Hasil dari wawancara yang penulis sudah lakukan bersama salah satu jukir yang ada di kota semarang, pembayaran retribusi yang sulit dibayarkan oleh juru parkir ini disebabkan karena beberapa faktor mulai dari toko yang menjadi tempat parkir tutup, ditutupnya beberapa akses jalan yang membuat toko tersebut sepi dan jam operasional yang hanya sebentar di sebabkan oleh ppkm level 4 pada saat tersebut. Berikut salah satu dri juru parkir yang penulis wawancarai lagi. Antisipasi yang di lakukan oleh jukir itu kurang efektif. Jika terus menerus dilakukan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang kurang baik.

Tabel 5.1.2

Hasil wawancara juru parkir II

NO	Pertanyaan	Jawaban Juru parkir
----	------------	---------------------

1	Sejauh mana dampak yang di timbulkan pada saat ppkm level 4 diterapkan ?	Cukup berdampak pada pendapatan perhari yang semula pada waktu normal bisa memperoleh hingga 150 ribu sekarang pada saat ppkm level 4 di
		terapkan hanya mendapat sekita 50sampai 70 ribu saja.
2	Berapa persen penurunan hasil pendapatan jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemic?	Penurunan selama ppkm tidak menentunaik turun sesuai dengan ppkm yang di terapkan missal ppkm level 4 yang dominannya diperketat otomatis pendapatan menurut hingga 60%
3	Apakah ada keluhan mengenai pembayaran retribusi parkir yang harus di bayarkan pada saat ppkm di terapkan?	Mengenai pemabayaran retribusi pada saat ppk mau tidak mau jika penghasilan tidak mencukupi otomatis menggunakan uang pribadi atau tabungan untuk membayar retribusi parkir.
4	Bagaimana cara mengantisipasi pembayaran retribusi pada saat ppkm berlangsung	Kalau antisipasi mungkin tidak ada hanya sedikit berhemat aja dri kehidupan sehari hari agar cukup untuk kebutuhan lainnya

Berdasarkan pada tabel 5.2 pada pembicaraan tersebut hampir sama dengan pembahasan pada tabel sebelumnya yaitu dimana jukir keberatan dengan pembayaran retribusi terutama pada saat pandemi atau pppk di lakukan oleh pemerintah. Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis bersama dengan juru parkir ke II yang di wawancarai di salah satu daerah di kota Semarang juru parkir kesulitan mengenai pembayaran retribusi yang di sebabkan oleh penurunan pendapatan hingga 60% di karenakan di terapkannya pppk di kota Semarang. Tetapi karena juru parkir merasa membayar retribusi sangat penting seperti halnya membayar pajak akhirnya juru parkir mengantisipasi dengan cara sedikit berhemat dalam kehidupan sehari hari. Langkah tersebut cukup efektif tetapi berdampak buruk untuk kehidupan keluarganya karena keluarga tersebut menjadi susah untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya.

5.2 PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara kedua juru parkir tersebut pada intinya sama sama mengalami hal yang sama dalam pembayaran retribusi yang harus dibayarkan. Akan tetapi masing masing jukir mempunyai cara masing masing untuk menanggapi krisis yang terjadi akibat pppk yang di terapkan di kota Semarang, namun kedua cara tersebut kurang efektif karena sama sama berdampak pada ekonomi walaupun secara tidak langsung perekonomian sudah berdampak pada saat pandemic berlangsung karena memang pandemi menyebabkan hampir semua

wilayah Indonesia mengalami penurunan ekonomi. Perlu adanya penyesuaian retribusi agar tidak memberatkan juru parkir terutama pada saat ppkm level 4 di terapkan, penyesuaian tersebut seperti keringanan pembayaran retribusi, penyesuaian diri dengan ppkm juga diperlukan agar tidak terjadi kelumpuhan perekonomian.

Dalam tingkat kepatuhan juru parkir diantaranya tingkat pembayaran retribusi parkir , tingkat kepatuhan dalam perizinan parkir, tingkat kepatuhan pada jam oprasional pada saat kerja, serta sanksi sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang melanggar ketentuan dari dinas perhubungan kota semarang. Perlunya beberapa perbaikan dan penyesuaian dalam dinas perhubungan kota semarang devisi parkir seperti penyesuaian pembayaran retribusi yang sedikit di ringankan sesuai dengan pandemi agar target realisasi tercapai, hingga perunya perbaikan dalam diri juru parkir tersebut agar tingkat kesadaran akan pembayaran retribusi parkir meningkat lagi.

5.2.1 Tingkat kepatuhan pembayaran retribusi parkir

Retribusi yang tidak di bayarkan oleh juru parkir dikarenakan beberapa alasan seperti penghasilan yang sangat sedikit di sebabkan oleh ppkm yang berlangsung cukup lama hingga alasan kesengajaan untuk tidak membayar dikarenakan ingin mendapat keuntungan yang banyakatau penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari hari. Perbuatan ketidak patuhan juru parkir tersebut membuat target retribusi parkir tidak terpenuhi dan semakin menjauhi, oleh sebab

itu di perlukannya penanganan dalam masalah tersebut dengan cara seperti penyesuaian pembayaran retribusi parkir agar tidak terlalu memberatkan juru parkir mengajukan keringanan ke dishub terkait pembayaran retribusi agar bisa lebih diperhatikan oleh dishub terutama pada masa pandemi seperti ini.

Penyesuaian pembayaran retribusi yang perlu di perbaiki yaitu seperti keringanan jangka waktu pembayaran retribusi, agar juru parkir bisa menabung sedikit demi sedikit dan tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari harinya. Selain memberikan kelonggaran bisa juga dengan cara memanfaatkan era digital dengan memanfaatkan form google agar juru parkir bisa mengajukan jika keberatan atau meminta keringanan dalam retribusi di karenakan pandemi agar lebih memudahkan juru parkir dalam berkeluh kesah mengenai kondisi yang sedang terjadi dan agar lebih cepat di tanggap oleh dinas perhubungan kota semarang.

5.2.2 Tingkat kepatuhan dalam perizinan parkir

Perizinan titik lokasi parkir yang masih kurang karena faktor kesengajaan juru parkir yang tidak izin kepada dinas perhubungan kota semarang agar terhindar dari retribusi contohnya biasa di sebut dengan parkir liar yang sering di jumpai di beberapa tempat terutama pada saat terselenggarakannya event . Perbuatan tersebut tentunya merugikan dan tidak adil, merugikan dikarenakan jika tidak izin dan tidak tercantum dalam dinas perhubungan maka tidak membayar retribusi parkir, hal

tersebut dapat mempengaruhi laju pendapatan retribusi parkir dan mengakibatkan target tidak terpenuhi. Perbuatan ketidakadilan tersebut juga menjadi pemicu juru parkir lain yang mengakibatkan kecemburuan social. Efek kecemburuan sosial tersebut dapat memprofokatori juru parkir yg lain untuk bersikap tidak baik pula. Untuk itu diperlukannya pula tindakan dari dinas perhubungan agar memberi sanksi tegas kepada juru parkir baru ataupun lama yang membuat masalah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tindakan tegas tersebut bisa dilakukan dengan contoh memberi denda atau sanksi tegas kepada jukir yang melanggar ketentuan daerah dengan melakukan tindakan ilegal atau tanpa izin.

5.2.3 Oprasional jam kerja diluar batas

Oprasional jam kerja yang di diajukan ke dinas perhubungan kota semarang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan dengan contoh juru parkir mengajukan lahan parkir yang beroperasi pada jam 06.00 hingga 15.00 tetapi juru parkir tetap beroperasi lebih dari jam oprasi yang sudah di ajukan. Jam operasional berlebih tersebut sebaiknya di tindak tegasi oleh dishub karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada saat pengajuan titik lokasi parkir dikarenakan perbuatan tersebut dapat menyebabkan kemacetan karena beroperasi diluar jam kerja juga bisa dikatakan sebagai parkir liar yang biasanya tidak teratur. Dengan kejadian jam oprasional diluar ketentuan tersebut dapat menyebabkan kemacetan dikarenakan

biasanya jika diluar jam oprasional maka tidak terpantau oleh dishub yang menyebabkan juru parkir beroperasi dengan seenaknya. Diperlukannya tindakan tegas untuk menanggapi permasalahan tersebut misalnya dengan cara menutup lahan parkir disaat tidak pada jam oprasional agar situasi lalu lintas kondusif dan tidak terganggu oleh parkir sembarangan.

5.2.4 Sanksi atau denda dalam pembayaran retribusi

Sanksi atau denda dalam pembayaran retribusi yang diberikan dishub kepada juru parkir yang melanggar ketentuan yang sudah dibuat bersifat relatif sesuai dengan kesalahan yang telah di perbuat. Dimulai dari masalah kecil seperti juru parkir tidak tertib dalam memarkirkan kendaraan pada bahu jalan yang dapat menyebabkan kemacetan maka biasanya akan di tegur atau diberi surat peringatan agar memperbaiki kesalahannya. Tetapi jika beberapa kali teguran tersebut di hiraukan maka akan mendapatkan tindakan tegas dari dishub kota Semarang. Bila masalah besar seperti kesengajaan juru parkir tidak melakukan kewajibannya dalam membayar retribusi maka akan di cabut surat izin beroprasinya lokasi parkir tersebut dan apabila juru parkir masih saja beroperasi maka bisa disebut juga parkir liar yang dimana jika ketahuan oleh dinas perhubungan maka akan di ambil KTP nya untuk di pertanggung jawabkan. Juru parkir legal dan ilegal biasanya bisa dilihat dari identitas yang digunakan oleh juru parkir tersebut seperti kartu izin juru parkir dan atributnya.

5.2.5 Peran jukir dalam meningkatkan tingkat kepatuhan

Peran juru parkir terhadap kepatuhan terhadap retribusi parkir jika dilihat dari tabel hasil wawancara 5.1.1 dan 5.1.2 maka juru parkir dapat disimpulkan belum sepenuhnya patuh terhadap pembayaran retribusi dikarenakan juru parkir kurang disiplin dan jujur dalam retribusi hal tersebut mengakibatkan target pendapatan retribusi parkir di Semarang tidak terpenuhi, seperti pada tabel 1.1 dimana realisasi yang diperoleh masih jauh dari target. Hal tersebut disebabkan juga oleh pandemi covid 19 yang berlangsung lebih dari 2 tahun yang menyebabkan pendapatan juru parkir menurun drastic dan membuat juru parkir enggan dalam membayar retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh Dishub Kota Semarang. Peran juru parkir sangat mempengaruhi pendapatan retribusi parkir di Kota Semarang dikarenakan jika juru parkir tidak patuh dalam pembayaran retribusi parkir otomatis pendapatan retribusi akan semakin menurun, untuk mengatasi hal tersebut selain perlunya perbaikan pada disiplin dan jujur dari juru parkir diperlukannya pula beberapa perbaikan pada ketentuan di dalam dinas perhubungan Kota Semarang bagian parkir agar lebih ditegaskan lagi atau lebih disesuaikan dengan keadaan seperti pandemic tersebut agar tidak terlalu memberatkan juru parkir tetapi juga tetap mempunyai unsur kedisiplinan agar juru parkir tidak seenaknya sendiri dalam pembayaran retribusi parkir contohnya mungkin pemberiansurat peringatan atau sanksi

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang Pengaruh Peran jukir dalam meningkatkan tingkat kepatuhan retribusi parkir di kota semarang, berdasarkan analisis deskriptif, maka kesimpulannya:

1. Penerimaan retribusi parkir di kota semarang dika dilihat melalui data pada tabel 1.1 penerimaan retribusi tersebut mengalami penurunan selama tahun 2019 hingga 2020. Penurunan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh pandemic covid 19 yang berlangsung hampir 3 tahun ini, pandemic tersebut membuat pendapatan juru parkir di kota semarang mengalami penurunan drastis bahkan sampai tutup lahan parkir dikarenakan tutup pula beberapa toko tersebut. Penurunan pendapat juru parkir sangat mempengaruhi terhadap pembayaran retribusi parkir seperti yang telah ditentukan oleh dinas perhubungan kota semarang dikarenakan penurunan pendapatan tersebut menyebabkan juru parkir enggan untuk membayar retribusi yang telah di tetapkan menyebabkan terjadinya tidak kepatuhan juru parkir terhadap retribusi parkir. Maka diperlukannya kedisiplinan dan kejujuran dalam juru parkir agar realisasi pendapatan naik dan dapat mencapai target yang ditentukan oleh dinas perhubungan kota semarang

2. Jam operasional parkir dan tingkat kepatuhan perizinan parkir masih belum terlaksana dengan baik dibuktikan dengan adanya beberapa juru parkir yang masih beroprasional di luar jam kerja yang telah disepakati dan masih ada beberapa titik lokasi parkir yang masih belum ada pada data dinas perhubungan kota Semarang atau biasa disebut dengan parkir liar. Hal tersebut perlu diperbaiki oleh dinas perhubungan kota Semarang dengan lebih mempertegas lagi ketentuan dan peraturannya yang ditetapkan agar juru parkir yang baru maupun lama tidak seenaknya sendiri dan patuh kepada ketentuan yang berlaku.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Rekomendasi terhadap hasil penelitian

- a) Perlunya pihak dinas perhubungan memperbaiki beberapa ketentuan untuk memberikankelonggaran kepada juru parkir agar juru parkir tidak tertakan dan agar target terpenuhi
- b) Diperlukannya komunikasi yang baik antara juru parkir dan dinas perhubungan agar tidakada miss komunikasi dan pihak yang dirugikan
- c) Juru parkir sebaiknya berani bertindak agar tidak semakin terpuruk seperti beranimelakukan pengaduan atau meminta keringanan mengenai pembayaran retribusi
- d) Perbaikan manajemen pengendalian perlu dilakukan agar lebih baik lagi kedepannyadalam pemungutan retribusi parkir.

6.2.2 Rekomendasi yang perlu diperbaiki organisasi tempat magang terhadap peserta magang

- a) Lebih mengarahkan dan memberikan instruksi yang jelas didalam memberikantugas kepada peserta magang.
- b) Memberikan jobdesk yang jelas kepada peserta magang, agar peserta magang tidakterlalu banyak jam kosong saat dikantor.
- c) Mendampingi dan menjelaskan tugas peserta magang dalam melakukan tugas yangdiberikan.

6.2.3 Rekomendasi yang perlu diperbaiki program studi

- a) Diharapkan pemantauan terhadap peserta magang MBKM lebih diperbaiki lagi guna meyakinkan pihak perusahaan terhadap program MBKM ini.
- b) Sebaiknya mahasiswa magang MBKM sebelum terjun ke sebuah perusahaan diberikan pengenalan terlebih dahulu tentang pekerjaan yang akan dilakukan.

Dengan begitu, peserta magang akan lebih siap secara fisik dan mental.

BAB VII

REFLEKSI DIRI

Dengan adanya program magang/praktik kerja bisa mendapatkan berbagai pengalaman, pengetahuan, dan juga manfaat lainnya selama berada ditempat magang. Tentunya dengan perkembangan parkir di kota semarang yang semakin banyak, dapat memunculkan beragam permasalahan yang akan menjadi sarana pembelajaran yang tepat bagi penulis dalam pengembangan diri penulis, baik itu berupa softskill ataupun hardskill. Salah satu pengembangan diri yang dirasakan oleh penulis seperti komunikasi, disiplin, tanggung jawab, dan juga kerjasama didalam tim.

7.1 Hal positif yang diterima selama perkuliahan dan relevan ditempat magang

Masa perkuliahan yang dialami penulis banyak mendapatkan hal positif saat kuliah yang bermanfaat serta relevan saat melakukan kegiatan magang. Diantaranya adalah pemberian tugas dalam kuliah yang memiliki manfaat menjadikan penulis sebagai orang yang disiplin yang sangat berguna saat magang sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Serta dalam pemberian tugas kelompok memiliki manfaat bagi penulis ketika melakukan kerjasama dengan tim saat magang. Presentasi yang dilakukan penulis dalam masa perkuliahan memiliki manfaat yang cukup besar dikarenakan dapat membuat penulis berani berbicara didepan umum serta meningkatkan skill public speaking yang dimiliki penulis

7.2 Manfaat magang terhadap pengembangan softskill dan kekurangan softskill

➤ Manfaat yang dirasakan penulis terhadap pengembangan skill yang dimiliki oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a) Skill Public Speaking dalam menjelaskan hasil pekerjaan kepada para peminat tempat magang.
- b) Tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan.
- c) Kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.
- d) Skill Leadership dalam memimpin tim untuk menuntaskan pekerjaan.

➤ Kekurangan Soft-Skills yang dimiliki penulis adalah :

- a) Kurang mampu mengontrol rasa panik jika terjadi permasalahan diluar yang susah terkendali.
- b) Masih sering keras kepala jika dirasa pendapatnya itu benar.
- c) Kurang berani mengexplore ide-ide baru untuk memecahkan suatu permasalahan.

7.3 Manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kognitif

Selama masa praktik kerja berlangsung banyak sekali manfaat yang didapat oleh penulis, salah satunya ialah dalam hal kemampuan kognitif yang dimiliki penulis.

➤ Kemampuan kognitif yang dimiliki penulis adalah:

- a) Pengembangan kognitif secara kinestetik dikarenakan saat masa magang penulis lebih banyak mendapatkan pekerjaan secara praktek.
- b) Pengembangan kognitif secara auditory yaitu kemampuan dalam mendengarkan penjelasan.
- c) Pengembangan kognitif secara visual yaitu kemampuan dalam membaca.

➤ Kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki penulis

- a) Kemampuan kognitif secara arithmetic yaitu kemampuan dalam melakukan penghitungan.

7.4 Kunci sukses bekerja

Berdasarkan pengalaman magang yang telah dialami penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa kunci sukses dalam bekerja, diantaranya adalah :

- a) Attitude

Dalam dunia pekerjaan attitude merupakan suatu hal yang harus dimiliki jika ingin sukses dalam bekerja, karena attitude itu sendiri dapat memudahkan kita dalam memiliki relasi terutama pada saat bekerja.

- b) Tanggung Jawab

Dalam menjalankan suatu pekerjaan ialah sebuah hal yang penting dalam bekerja, dari berbagai banyak manfaat yang didapat jika bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas atau pada saat kerja.

c) Disiplin

Disiplin ialah sebuah kunci kesuksesan dalam menjalankan pekerjaan. Dalam melakukan suatu pekerjaan disiplin harus diterapkan tidak hanya pada kehidupan sehari-hari namun pada pekerjaan juga harus diterapkan.

d) Memiliki Tujuan

Suatu hal yang harus dimiliki dikarenakan dalam melakukan pekerjaan harus memiliki tujuan agar pada saat kita bekerja kita dapat mengetahui tujuan apa yang akan kita capai dalam pekerjaan serta mengambil keputusan yang tepat dalam pekerjaan.

e) Motivasi Kerja

Motivasi merupakan hal yang penting dalam kunci sukses bekerja, motivasi dapat meningkatkan keinginan dalam mencapai tujuan yang dimiliki dan dapat menambah semangat pada saat melakukan pekerjaan tersebut.

f) Berani Berpendapat

Dalam melakukan pekerjaan sering terjadi beberapa perbedaan pendapat oleh karena itu berani berpendapat merupakan salah satu kunci sukses bekerja dikarenakan pendapat dari diri sendiri juga memiliki nilai yang besar dalam pengambilan keputusan.

g) Menerima Saran dan Kritik

Dalam bekerja kita tidak boleh menolak saran dan kritik terhadap kita dikarenakan penilaian orang lain juga diperlukan untuk mengetahui letak kesalahan kita dalam bekerja, dan menjadikan kita lebih baik lagi kedepannya.

h) Berpikir cepat dalam mengatasi masalah

Pemikiran yang cepat dan tanggap dalam mengatasi masalah saat bekerja juga merupakan kunci sukses dalam bekerja, dikarenakan saat bekerja banyak permasalahan yang tak terduga muncul secara tiba-tiba sehingga menuntut diri kita untuk berpikir cepat dan tanggap dalam bekerja.

7.5 Rencana pengembangan diri

Dalam mengatasi masalah yang ada pada saat magang maka penulis ingin melakukan pengembangan diri dari karir penulis dimasa yang akan datang. Salah satu pengembangan diri yang akan dilakukan penulis yaitu dengan kemampuan berpikir secara jernih, tenang dan cepat dalam menghadapi suatu masalah yang dihadapi dikarenakan hal tersebut menjadi penghambat untuk penulis pada saat melakukan magang.

DAFTAR PUSTAKA

- NIM, E. P. (2013). *Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Piutang Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Nuh Cahya Utama, (2016). *Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan UPTD Parkir Sub Unit Tepi Jalan Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya*. Volume 4 Nomor 1. ISSN: 2303-341X.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*.
- Undang Undang Lalu Lintas Aturan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)
- Kesek, Feisly. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*.
- Yogi Prasetyo. (2019). *Analisis pengelolaan retribusi parkir jalan umum pada dinas perhubungan dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah kota palembang*.
- Astuti, N.K.R. 2013. *Dampak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar*.
- Kepala Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang, “Pemkot Semarang Kurang Tegas Parkir Liar Hasilkan Rp.1,4 Milyar”, 2013, diakses dari indenpers-media.co.id,
- Sadu Wasistiono, “Manajemen Pemerintahan”, 2015, diakses dari saduwasistiono.ipdn.ac.id